



Transformation of Higher Education Policy: A Literature Study on the Shift from Kampus Merdeka to Diktisaintek Berdampak

Septi Fitriana¹, Yudi Hendrilia², Loso Judijanto³, Sulaeman⁴, Rosyida Nurul Anwar⁵

¹Universitas Bengkulu, ²STT Kanaan Nusantara. Ungaran, ³IPOSS Jakarta, ⁴Universitas Nahdaltul Ulama Cirebon, ⁵Universitas PGRI Madiun

EMAIL: ¹septifitriana@unib.ac.id, ²yudihendrilia@gmail.com, ³losojudijantobumn@gmail.com, ⁴sulaeman.beasiswa@gmail.com, ⁵rosyidanurul@unipma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to understand the complexity of higher education policy transformation in Indonesia by comparing two major policy approaches: Kampus Merdeka and Diktisaintek Berdampak. Using a descriptive qualitative approach and the method of literature review, this research analyzes various secondary sources such as official policy documents, scholarly journals, academic books, and research reports. The findings indicate that Kampus Merdeka focuses on learning flexibility, institutional autonomy, and strengthening student engagement with the professional world and society, although its implementation still faces infrastructure challenges and disparities between institutions. Meanwhile, Diktisaintek Berdampak emphasizes research downstreaming, innovation commercialization, and the active role of higher education in the development of a knowledge-based economy. This shift reflects a paradigmatic change from academic autonomy toward a strategic and applicative impact orientation. In conclusion, both policies need to be synergized within an inclusive, adaptive, and collaborative higher education ecosystem to produce high-quality and competitive graduates while contributing meaningfully to national development.

Keywords: higher education, Kampus Merdeka, Diktisaintek Berdampak

PENDAHULUAN

Transformasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami berbagai fase penting dalam dua dekade terakhir. Dari era desentralisasi pendidikan hingga integrasi riset ke dalam sistem perguruan tinggi, dinamika kebijakan ini selalu mencerminkan interaksi antara kebutuhan nasional, globalisasi, dan visi pembangunan jangka panjang. Salah satu fase penting dalam perjalanan ini adalah lahirnya kebijakan Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Nadiem Makarim sebagai bagian dari visi Merdeka Belajar. Kampus Merdeka bertujuan merevolusi cara belajar mahasiswa dengan memberikan kebebasan akademik melalui fleksibilitas kurikulum dan pembelajaran berbasis pengalaman di luar kampus (Rati, 2024); (Faturrohman, 2023). Mahasiswa didorong untuk menghabiskan sebagian waktunya di luar lingkungan akademik formal untuk belajar di dunia industri, masyarakat, dan institusi lain. Seperti dikemukakan oleh Komariah, (2023), dan Ifendi, (2025) Kampus Merdeka merupakan lompatan besar dari paradigma pendidikan tradisional menuju pendekatan yang lebih terbuka dan responsif terhadap tantangan zaman.



Namun, meskipun ide Kampus Merdeka terdengar progresif, implementasinya tidak luput dari kritik. Banyak institusi perguruan tinggi belum siap dengan infrastruktur, kebijakan internal, dan sumber daya manusia yang memadai untuk menyukseskan transformasi ini. Dalam kajiannya, Nailurrohman & Sutrisno, (2023) mencatat bahwa perbedaan kesiapan antar perguruan tinggi menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga menimbulkan kesenjangan pengalaman belajar antar mahasiswa. Ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam pelaksanaan konsep kebebasan akademik.

Kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami pergeseran signifikan dengan penekanan pada hilirisasi riset, komersialisasi inovasi, dan integrasi sains-teknologi dalam pembangunan ekonomi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktisaintek) melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) mengadopsi strategi baru yang dikenal sebagai Diktisaintek Berdampak. Strategi ini bertujuan menjadikan pendidikan tinggi sebagai motor utama pertumbuhan berbasis pengetahuan dan teknologi yang berdampak langsung pada masyarakat. Dirjen Dikti menekankan bahwa perguruan tinggi harus menjadi lokomotif utama dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebutkan bahwa pendidikan tinggi harus berfokus pada peningkatan akses, mutu, relevansi, serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Kemendiknas juga meluncurkan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem riset dan inovasi. Program ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah guna menghasilkan riset yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Namun, pendekatan Diktisaintek Berdampak juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai nasib otonomi keilmuan dan ruang refleksi akademik. Jika tekanan terhadap output riset terlalu dominan, maka ada risiko reduksi terhadap fungsi humaniora, seni, dan ilmu sosial yang juga penting dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Marginson, (2011) mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi yang terlalu berorientasi pada pasar cenderung mengikis kebebasan akademik dan mempersempit misi pendidikan hanya pada fungsi ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam memahami kompleksitas transformasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan membandingkan dan mengkritisi dua pendekatan kebijakan besar Kampus Merdeka dan Diktisaintek Berdampak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research) untuk menelaah transformasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pergeseran dari paradigma Kampus Merdeka ke Diktisaintek Berdampak. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji konsep, kebijakan, dan wacana akademik melalui telaah sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang kredibel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta artikel opini dari pakar pendidikan. Sumber-sumber ini dikumpulkan melalui pencarian terstruktur di portal-portal ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, ResearchGate, dan laman resmi Kemendikbudristek.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumenter, yakni penelusuran dan telaah dokumen yang berisi kebijakan dan literatur akademik yang relevan. Literatur dipilih



secara purposif dengan kriteria tertentu, antara lain memiliki relevansi langsung dengan kebijakan Kampus Merdeka dan/atau Diktisaintek Berdampak, terbit dalam rentang waktu 2019–2025, serta diterbitkan oleh lembaga yang kredibel atau jurnal terakreditasi. Strategi purposif ini memungkinkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada sumber-sumber yang paling signifikan dalam mendukung analisis.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, yang mencakup identifikasi tema-tema utama, perbedaan paradigma kebijakan, tujuan strategis, serta dampak implementatif dari masing-masing kebijakan. Proses analisis diawali dengan reduksi data untuk menyaring literatur yang paling relevan, dilanjutkan dengan kategorisasi tematik seperti “otonomi akademik”, “hilirisasi riset”, “fleksibilitas kurikulum”, dan “daya saing nasional”. Tahap akhir adalah interpretasi kritis yang bertujuan mengevaluasi makna, kecenderungan, serta implikasi dari pergeseran arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kampus Merdeka (2020–2024)

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan inisiatif strategis yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan tinggi di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan industri, serta globalisasi pendidikan. Kampus Merdeka adalah upaya memberi ruang kebebasan dan inovasi seluas-luasnya kepada perguruan tinggi dan mahasiswa untuk berkembang sesuai potensinya (Aristanto, 2024);(Marisa, 2021). Inisiatif ini menekankan pentingnya fleksibilitas, otonomi institusional, dan pembelajaran kontekstual.

Salah satu pilar utama dari Kampus Merdeka adalah pemberian otonomi dalam pembukaan program studi baru (Susetyo, 2020). Kebijakan ini memungkinkan perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B untuk membuka prodi baru, dengan syarat menjalin kemitraan dengan organisasi atau universitas yang tergolong dalam QS Top 100 World Universities. Prodi baru tersebut akan langsung mendapatkan akreditasi C sebagai bentuk kepercayaan terhadap mutu institusi. Tujuan dari kebijakan ini adalah mempercepat adaptasi institusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti ditegaskan dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2020, pembukaan program studi harus berbasis pada kebutuhan pasar kerja dan kemitraan strategis. Kebijakan kedua adalah reakreditasi otomatis, yang menjadi bentuk penyederhanaan birokrasi penjaminan mutu (Nizar Nizar et al., 2023). Dalam kebijakan ini, akreditasi program studi dan institusi yang berlaku lima tahun akan diperbarui secara otomatis kecuali ada pengajuan peningkatan akreditasi. Perguruan tinggi dapat mengajukan reakreditasi paling cepat dua tahun sejak akreditasi terakhir.

Aspek ketiga adalah kebebasan perubahan status kelembagaan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Sebelumnya, perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah kriteria akreditasi sebelum dapat berubah status. Dalam skema Kampus Merdeka, PTN berstatus Satker atau BLU dapat langsung mengajukan perubahan status kelembagaan menjadi PTN BH. Dengan status tersebut, perguruan tinggi memperoleh kewenangan otonom dalam pengelolaan keuangan, SDM, dan kerja sama internasional. Menurut Dikti, (2020) langkah ini memberikan fleksibilitas kelembagaan untuk mendorong perguruan tinggi menjadi pusat unggulan di tingkat global.

Fleksibilitas yang paling menonjol dalam kebijakan ini adalah pengakuan SKS di luar program studi. Mahasiswa diberi hak untuk mengambil 20–40 SKS di luar program studinya melalui kegiatan seperti magang, proyek desa, pertukaran pelajar, studi independen, hingga



penelitian. Ini merupakan upaya redefinisi pembelajaran dari sekadar teori menuju pengalaman langsung. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020, kegiatan tersebut diakui sebagai bagian dari pembelajaran berbasis capaian kompetensi dan dianggap setara dengan pembelajaran di kelas.

Secara keseluruhan, kebijakan Kampus Merdeka bertujuan mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan menekankan kebebasan akademik, fleksibilitas kurikulum, dan kolaborasi lintas sektor (Wati et al., 2023);(Muh, 2023). Meskipun konsepnya menjanjikan, pelaksanaannya di lapangan menghadapi tantangan seperti ketimpangan sumber daya antar institusi, kurangnya kesiapan infrastruktur digital, serta perlunya peningkatan kapasitas dosen. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), tercatat bahwa banyak kampus masih memerlukan pedoman teknis dan dukungan kebijakan lanjutan agar kebebasan yang ditawarkan Kampus Merdeka bisa diimplementasikan secara optimal.

Pergeseran ke Diktisaintek Berdampak (2024–Sekarang)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) mengusung narasi baru dalam kebijakan pendidikan tinggi Indonesia, yaitu Diktisaintek Berdampak. Kebijakan ini menekankan pentingnya hilirisasi hasil riset, komersialisasi inovasi, serta integrasi sains dan teknologi dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Tujuan utamanya adalah mengubah peran pendidikan tinggi dari sekadar pusat akademik menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), di mana riset dan inovasi tidak hanya berhenti pada publikasi, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat, industri, dan kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai salah satu lokomotif utama kemajuan bangsa.

Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma mendasar dalam kebijakan pendidikan tinggi Indonesia dari fokus pada otonomi akademik dan pengembangan keilmuan internal ke arah penguatan fungsi aplikatif riset dan inovasi. Perguruan tinggi didorong untuk menjadi problem solver yang langsung menjawab isu-isu strategis nasional seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, teknologi kesehatan, dan industri berbasis digital. Dalam konteks ini, otonomi akademik tetap penting, namun tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan instrumen untuk mencapai kinerja riset yang produktif dan berdampak.

Sebagai bagian dari transformasi ini, Ditjen Diktiristek juga melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di perguruan tinggi melalui lokakarya yang membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pemahaman terhadap teknologi, media digital, serta *Artificial Intelligence* (AI) menjadi kemampuan yang dibutuhkan oleh jabatan tenaga kependidikan, seperti arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pranata laboratorium pendidikan, dan pustakawan (Setyawan, 2022). Kegiatan ini menunjukkan komitmen Ditjen Diktiristek untuk mengelola sumber daya manusia menjadi kompeten dan berdaya saing, mendukung visi perguruan tinggi sebagai agen pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Pembahasan

Kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbud pada tahun 2020 membawa dampak positif dalam hal fleksibilitas pembelajaran dan peningkatan relevansi pendidikan tinggi. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil hingga tiga semester di luar program studi, baik melalui magang, proyek desa, pertukaran pelajar, wirausaha, maupun riset independen. Kampus Merdeka juga memberi otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi dalam membuka program studi baru yang relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menciptakan ruang inovasi di tingkat institusi, terutama dalam

merespons perubahan global secara lebih cepat. Berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020, perguruan tinggi yang terakreditasi A dan B dapat membuka program studi baru secara mandiri dengan mitra strategis dari dunia internasional, yang diharapkan mendorong daya saing global dan pemutakhiran kurikulum secara kontekstual.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini tidak berjalan mulus di semua institusi. Tantangan muncul dari perbedaan kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM, serta birokrasi internal di berbagai perguruan tinggi. Penelitian oleh Susanti et al., (2023) menunjukkan bahwa tidak semua institusi memiliki sistem pendukung dan kolaborasi industri yang memadai untuk menyelenggarakan program-program Kampus Merdeka secara efektif. Akibatnya, terjadi ketimpangan pelaksanaan yang berdampak langsung pada kualitas pengalaman belajar mahasiswa antar kampus. Kesenjangan ini menciptakan risiko diskriminasi pengalaman belajar antara mahasiswa dari kampus besar dan kampus kecil. Mahasiswa dari perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas kerap tidak mendapat akses yang sama terhadap program magang berkualitas atau pertukaran pelajar internasional.

Perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang reflektif, inovatif, sekaligus kritis terhadap problem sosial. Otonomi akademik harus dipertahankan sebagai pilar penting kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi ilmiah. Namun, hal ini tidak berarti mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional. Sebagaimana ditegaskan oleh UNESCO, (2021) pendidikan tinggi memiliki peran ganda: sebagai penghasil pengetahuan dan sebagai agen perubahan sosial. Dalam konteks ini, perguruan tinggi diharapkan mampu menyeimbangkan tanggung jawab akademik dengan kontribusi nyata pada masyarakat melalui riset, inovasi, dan aplikasi teknologi.

Transformasi pendidikan tinggi Indonesia harus diarahkan pada penciptaan ekosistem yang inklusif, berdampak, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil harus diperkuat agar setiap kebijakan baik Kampus Merdeka maupun Diktisaintek Berdampak tidak hanya berjalan sebagai proyek administratif, tetapi sebagai gerakan kolektif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan inovasi, integritas ilmiah, dan keberpihakan sosial menjadi kunci dalam menavigasi arah kebijakan pendidikan tinggi masa depan.

KESIMPULAN

Transformasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia dari Kampus Merdeka ke Diktisaintek Berdampak mencerminkan pergeseran paradigma dari otonomi dan fleksibilitas akademik menuju orientasi pada dampak nyata melalui riset, inovasi, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Kampus Merdeka berhasil membuka ruang pembelajaran lintas sektor dan memperkuat otonomi institusi, meski masih menghadapi tantangan ketimpangan sumber daya dan kesiapan implementasi. Sementara itu, Diktisaintek Berdampak mendorong hilirisasi riset dan integrasi sains-teknologi untuk menciptakan pendidikan tinggi sebagai motor penggerak ekonomi berbasis pengetahuan. Keduanya perlu disinergikan dalam sebuah ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif agar dapat menghadirkan perguruan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dan berdampak bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanto, A., Maq, M. M., Iqbal, M., Prananda, G., & Efrina, G. (2024). NEW LEARNING PARADIGM THROUGH KURIKULUM MERDEKA IN PRIMARY SCHOOLS. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 5398–5408.
- Dikti, D. (2020). Kampus Merdeka: Kebijakan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. In <https://dikti.kemdikbud.go.id/kampus-merdeka/>.
- Faturrohman, M. (2023). *Paradigma Pembelajaran Kurikulum*.
- Ifendi, M. (2025). KURIKULUM CINTA: MEMBANGUN PARADIGMA PENDIDIKAN BERBASIS KASIH SAYANG DI MADRASAH. *As-Sulthan Journal Of Education (ASJE)*, 01(04), 698–711.
- Komariah. (2023). MERDEKA BELAJAR: Konstruksi Pedagogi Kritis Dalam Kurikulum Merdeka . In *UNISMA PRESS*.
- Marginson. (2011). How free is academic freedom?. In *Higher Education Research & Development* (Vol. 16, Issue 3, pp. 3–41).
- Marisa, M. (2021). Inovasi Kurikulum “Merdeka Belajar” di Era Society 5.0. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)*, 5(1), 72.
- Muh. (2023). Inovasi Dalam Bidang Kurikulum: Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan Penerapannya. *Jurnal Educatio*, 9(4), 2194.
- Nailurrohmah Khoiri, & Sutrisno, S. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid 19. *Irfani*, 19(1), 1–16.
- Nizar Nizar, Reo Tomi Pratama, & Mustafiyanti Mustafiyanti. (2023). Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(1), 53–65.
- Rati. (2024). Mengasah Soft Skills dan Hard Skills Melalui Program MBKM: Strategi dan Implementasi. In *Nilacakra*.
- Setyawan, S. (2022). Teaching 5.0: Metode-Metode Pembelajaran Creative, Collaborative, Communicative, dan Critical Thinking. In *PT Kanisius*.
- Susanti, N., Salam, R., Setyowati, R. D. E., Simbolon, B. R., Sukomardojo, T., Alhamda, S., Amin, F., & Prasetyo, D. (2023). The Evaluation of “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” Program: A Breakthrough or a Wrong Way. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(1), 882–892.
- Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan*

Bahasa Dan Sastra, 1(1), 29–43.

UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: a new social contract for education.*

Wati Desi Sri Setyo, Aziz Abd, & Fitri Agus Zaenul. (2023). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. *Journal of Education Research, 4(3), 1021–1030.*

